

**POLITIK PERHAJIAN DI INDONESIA
TAHUN 1960 - 1970**



SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga untuk
Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Humaniora (S.Hum)

Oleh :
Syaiful Haq
02121019

JURUSAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Adab
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalâmu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

“ Politik Perhajian di Indonesia : Tahun 1960 – 1970 ”

yang ditulis oleh:

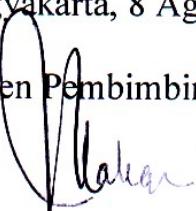
Nama : Syaiful Haq
NIM : 02121019
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

Wassalâmu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2009

Dosen Pembimbing,


Dr. Maharsi, M. Hum.
NIP: 19711031 200003 1 001



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fax. (0274) 513949

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DA/PP.00.9/ 127/2010

Skripsi dengan judul : POLITIK PERHAJIAN DI INDONESIA 1960-1970

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Syaiful Haq

NIM : 02121019

Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Agustus 2009

Nilai Munaqasyah : B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang,

Dr. Maharsi, M. Hum

NIP.19711031 200003 2 001

Pengaji I,

Drs. Badrun Alaena, M.Si

NIP. 19631116 199203 1 003

Pengaji II,

Dr. Imam Muhsin, M. Ag

NIP.19730108 199803 1 010

Yogyakarta, 29 Januari 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Adab

DEKAN



MOTTO

Proses, adalah suatu perjalanan menuju sebuah keberhasilan.

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini,
Aku persembahkan buat:
Almamaterku Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga ;
Bapakku M. Zuhri Anwar (Alm) dan Ibuku Ma'rifah
serta seluruh keluargaku,
Cahayaku yang selalu menari di atas lamunanku

ABSTRAK

Penelitian ini memaparkan suatu politik pemerintah terhadap umat Islam khususnya jemaah haji pada proses penyelenggaraan Ibadah haji pasca kemerdekaan. Dalam sudut pandang tertentu proses penyelenggaraan haji selalu mengalami keadaan yang tidak menguntungkan bagi calon haji. Bagaimana proses pelaksanaan haji masa pemerintahan Kolonial Belanda yang kemudian memunculkan *Islamophobia* dan *Hajiphobia*, Belanda khawatir terhadap sikap nasionalisme kelompok Islam dan para Haji setelah pulang dari Mekkah yang akan melakukan gerakan-gerakan tertentu. Setelah kemerdekaan umat Islam mengalami kondisi stagnasi akibat tekanan pemerintahan Soekarno. Kondisi ini yang kemudian masuknya pemikiran-pemikiran transnasional baru yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun, semakin kuatnya tekanan rezim Soekarno sehingga mengakibatkan konflik dan gerakan-gerakan umat Islam bawah tanah terhadap pemerintah. Begitu masifnya gerakan Islam terhadap pemerintah yang pada akhirnya umat Islam mendapatkan label Islam ala “Ikhwanul Muslimin” dan Islam “Ekstrim Kanan” masa pemerintahan Soeharto. Ketegangan pemerintah Indonesia dengan umat Islam dalam ranah konstitusi hingga masuk pada wilayah agama hingga berdampak pada proses perjalanan Haji, satu sisi pemerintah melakukan pengarahan terhadap jemaah haji, pada sisi yang lain pemerintah juga melakukan pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori kekuasaan MacIver, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan prilaku orang lain secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung dilakukan dalam bentuk memaksa, sedangkan secara tidak langsung berupa penyusunan segala infrastruktur kekuasaan yang dapat dilakukan melalui proses rekayasa. Dalam penelitian ini juga menggunakan konsep idiologi. Penelitian dan penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah, yaitu dalam pengkajian dan menganalisis permasalahannya mengutamakan perspektif masa lampau dari obyek yang diteliti.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah yang selalu memberi nikmat kepada makhluk-Nya. Terutama sekali, kenikmatan berupa petunjuk dalam kehidupan menuju keridhaan-Nya. Serta, berkat atas rahmat dan izin-Nya pula, penulis dapat menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah, Nabiyullah Muhammad saw., juga seluruh keluarga beliau dan para sahabat beliau serta orang-orang beriman yang selalu mengikuti jejak langkah beliau.

Skripsi yang berjudul “Politik Perhajian di Indonesia” ini merupakan upaya penulis untuk memahami politik perhajian pemerintah terhadap umat Islam pada umumnya dan jemaah haji pada khususnya. Minat penulis menyusun skripsi atau karya ilmiah ini berawal dari minimnya kajian-kajian mengenai perhajian di Indonesia khususnya skripsi-skripsi yang berada di fakultas Adab. Penulis kemudian tergugah untuk membuat sebuah karya ilmiah mengenai perhajian di Indonesia. Oleh karena itu, Skripsi ini akhirnya dapat selesai juga tak lepas dari dukungan-dukungan dari berbagai pihak.

Dr. Maharsi, M.Hum, sebagai pembimbing adalah orang yang pertama yang paling pantas mendapatkan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-

tingginya. Di tengah-tengah kesibukannya yang padat, beliau rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada penulis. Oleh karena itu, tidak ada kata yang lebih indah untuk disampaikan kepada beliau selain ucapan terima kasih sedalam-dalamnya diiringi doa semoga jerih payah dan pengorbanannya, baik moril maupun materiil, dibalas dengan berlipat kebaikan di sisi-Nya.

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M.Ag., Dekan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Dr. Maharsi, M.Hum., Ketua Jurusan SKI sekaligus Dosen Pembimbing Akademik; dan seluruh Dosen di Jurusan SKI yang telah memberikan “pelita” kepada penulis di tengah luasnya samudra ilmu yang tidak bertepi.

Terima kasih pula kepada teman-teman mahasiswa Jurusan SKI A, B, C, khususnya angkatan 2002, juga teman-teman yang penulis kenal dan tidak dapat disebutkan satu-persatu. Tak lupa saya ucapkan juga kepada teman-teman Mahasiswa Sunan Kalijaga Yogyakarta Jepara (MASKARA) yang telah memberikan ruang-ruang ide serta gagasan, baik angkatan 2000 hingga sekarang, saya tidak dapat menyebut satu persatu; Teman-teman kost BIOSTAP Gaten (tepatnya kost buat renungan); Kawan-Kawan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) yang tempoe dulu pernah berproses bersama. Kebersamaan kita, saling mendukung dan saling membantu, serta senasib dan seperjuangan telah menjadi energi penyemangat dan pendorong bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam disertai rasa haru dan hormat penulis sampaikan secara khusus kepada kedua orang tua penulis, M. Zuhri Anwar (Alm) "engkau pergi disaat aku sedang mencari idealisme" serta Ibu Ma'rifah yang selalu memanjatkan do'a untukku lewat tetesan air matanya, Saudara-saudaraku dirumah serta "cahayaku" yang selalu dirundung kegalauan diujung sana. Merekalah yang membesarkan, mendidik dan selalu memberi perhatian yang besar kepada penulis sehingga penulis dapat mengerti arti kehidupan ini. Segala do'a dan curahan kasih sayang yang mereka berikan, penulis dapat memahami bahwa itu semua adalah demi kebahagiaan penulis.

Atas bantuan dari berbagai pihak di atas itulah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Namun demikian, di atas pundak penulislah skripsi ini dipertanggung jawabkan. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, 8 Agustus 2009 M.
17 Sya'ban 1430 H

Penulis.

Syaiful Haq

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan dan Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 11 |
| D. Tinjauan Pustaka | 12 |
| E. Landasan Teori | 14 |
| F. Metode Penelitian | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan | 18 |
| | |
| BAB II KONDISI PERJALANAN HAJI DI INDONESIA | 20 |
| A. Makna haji | 20 |
| B. Perjalanan Haji Masa Pemerintahan Belanda | 22 |
| C. Perjalanan Haji Setelah Kemerdekaan | 26 |
| 1. Masa Pemerintahan Soekarno..... | 26 |
| 2. Masa Pemerintahan Soeharto..... | 30 |
| | |
| BAB III PEMERINTAH DAN POLITIK PERHAJIAN | 33 |
| A. Ketegangan Pemerintah dengan Umat Islam..... | 33 |
| B. Gerakan Transnasional | 38 |
| 1. Ikhwanul Muslimin..... | 40 |
| 2. Wahabi | 43 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV PENETAPAN POLITIK PERHAJIAN..... | 45 |
| A. Latar Belakang Kebijakan | 45 |
| B. Politik perhajian | 47 |
| 1. Politik Perhajian: suatu kebijakan awal | 47 |
| 2. Penghapusan Subsidi..... | 48 |
| 3. Munculnya Keputusan Presiden..... | 49 |
| C. Respon Umat Islam | 52 |
| BAB V PENUTUP | 56 |
| A. Kesimpulan | 56 |
| B. Saran-saran | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | 59 |
| DOKUMEN-DOKUMEN | |
| 1. PERPRES No. 3 TAHUN 1960 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN HADJI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | i |
| 2. KEPRES RI NOMOR. 22 TAHUN 1969 | v |
| 3. INPRES RI NOMOR. 6 TAHUN 1969..... | viii |
| 4. KETERANGAN MENTERI AGAMA TENTANG POLITIK PEMERINTAH TENTANG MASALAH HAJI | xiv |
| 5. UU TRANMIGRASI TENTANG PASPORT..... | xv |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | |
| 1. DATA JUMLAH JEMAAH HAJI INDONESIA TAHUN 1950-1981 | xvi |
| 2. DATA KOMPAS 23 DESEMBER 2003 TENTANG DATA JUMLAH JEMAAH HAJI DAN PEMBIAYAAN HAJI TAHUN 1949-2003 | xvii |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam percaya bahwa Makkah¹ adalah tempat suci bagi agama Islam seluruh dunia. Kesucian ini dibuktikan dengan berdirinya monumen Ka'bah² dan maqam Ibrahim³ sebagai salah satu tempat melaksanakan ritual

¹ Mekkah al-Mukarromah berada di bagian barat wilayah pemerintahan Arab Saudi yang berada di Hejaz. Tepatnya di tengah lembah yang dikelilingi gunung di sekitarnya yang melingkari Ka'bah yang mulia. Bagian Timur, Masjidil Haram disebut Ma'la, bagian barat dan selatan disebut Misfalah. Lihat DR. Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Kota Mekah Klasik dan Modern*, (Jakarta: AKBAR, 2003), hlm. 7.

² Di dalam kitab-kitab keagamaan disebutkan bahwa Malaikat telah membina Baitullah (Ka'bah) sejak dulu kala. Baitullah dijadikan tempat bertasbih, membersihkan diri, sholat dan sujud siang malam. Di Baitullah ini Malaikat memohon ampun kepada Allah agar dijauhkan dari kemurkaan-Nya.

Dalam perkembangan selanjutnya, pembinaan Ka'bah tersebut tidak hanya dilakukan oleh para Malaikat, akan tetapi pembinaan tersebut dilakukan oleh para Nabi misalnya Nabi Adam as, Nabi Syeth, Nabi Ibrahim as, dan Nabi Ismail.

Diriwayatkan pula, setelah Nabi Adam diterima taubatnya, ia diperintahkan Tuhan supaya pergi menuju Ka'bah melalui ilham dan petunjuk Jibril. Setelah tiba di Makkah, tidak lama kemudian Nabi Adam as. Melakukan pembinaan Ka'bah. Pada waktu melakukan pembinaan Ka'bah ini Nabi Adam memerlukan batu yang banyak. Batu-batu tersebut diambil dari dari bukit Thursina dan Zibuan yang terletak di Syam, Aljudi dan bukit Hira di Mekkah. Setelah Nabi Adam as. meninggal dunia pembinaan selanjutnya dilakukan oleh anak-anaknya. Pada perkembangnya, Ka'bah mengalami kerusakan dan akhirnya runtuh. Batu-batunya berserakan dan bekas-bekasnya hilang serta sukar dikatahui. Maka dikabarkan, dengankehendak Tuhan maka Nabi Syetlah yang meneruskan pembinaan itu.

Mekkah beberapa kali mengalami kerusakan dan bahkan hampir tidak dapat diketahui bekasnya, angina taufan dan banjir bandang masa Nabi Nuh merupakan malapetaka yang sangat dasyat sehingga Ka'bah hanya menyisakan tumpukan batu-batu dan tanah.. Namun, masyarakat Nabi Nuh tetap berduyun-duyun melakukan do'a-do'a didepan Ka'bah. Hingga sekarang, Ka'bah sudah beberapa kali mengalami renovasi dan perbaikan. Lihat Sudarsono dan Susmayati, *Mengenal Keesaan Tuhan Ka'bah Pemersatu Umat Islam*, (t.t: Asdi Mahasty, 1992), hlm. 1-7.

³ *Maqam* secara bahasa berarti tempat kaki orang yang berdiri. Sedangkan, maqam Ibrahim adalah batu yang dibawa oleh Nabi Ismail tatkala membangun Ka'bah sebagai tempat pijakan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail mengambil batu dan Nabi Ibrahim meletakkan ditanganya. Maka, semakin tinggi bangunan semakin tinggi pula pijakan itu (maqam Ibrahim).

Adapun keutamaan-keutamaan Maqam Ibrahim yakni *Pertama*, dijadikan sebagai tempat shalat (musalla) sebagaimana surat al-Baqarah ayat 125. *Kedua*, Yaqut dari Syurga. *Ketiga*, tempat dikabulkannya do'a. Hal ini dilakukan Rasullullah ketika melakukan haji Wada', setelah memasuki kota Mekkah, Nabi segera ke Ka'bah untuk melaksanakan thawaf tujuh kali putaran kemudian dilanjutkan berdo'a di maqam Ibrahim. Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Kota Mekah*, (Jakarta: AKBAR, 2003), hlm. 89-90. lihat juga K. Ali, *Sejarah Islam (Tarikh Pramodern)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 72.

ibadah haji. Mekkah (Ka'bah) juga merupakan kiblat bagi seluruh umat Islam,⁴ tempat menerima wahyu Nabi Muhammad hingga pusat legitimasi politik para raja.

Sebagai Tanah Arab, Makkah merupakan wilayah strategis mencari sumber informasi, pengaruh serta mencari ilmu antara haji yang satu dengan haji lainnya. Mereka bertemu dan – secara tidak langsung - saling memberikan pengaruh antara para haji. Para haji bertemu dengan saudara seiman dan belajar kepada para guru-guru yang sama, sehingga para haji mengetahui informasi perkembangan dan gerakan di Negara-negara muslim lainnya.⁵

Fungsi Mekkah yang begitu kompleks bagi umat muslim di atas, menjadi indikator bahwa mengunjungi Ka'bah dalam Mekkah adalah suatu kewajiban bagi umat muslim. Hal ini ditekankan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, 3:97

”Padanya terdapat tanda-tanda nyata (diantaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah”.⁶

Begitu juga dalam hadist disinggung mengenai pentingnya berhaji, petunjuk inilah yang kemudian seseorang ter dorong untuk melakukan sebuah ibadah ilahi.

⁴ Allah telah berjanji dalam kitab suci-Nya dengan Mekkah sebanyak dua kali. Pahala shalat di Masjidil Haram dilipatgandakan. Disinilah kiblat seluruh penduduk bumi. Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Kota Mekkah*, hlm. 8.

⁵ Martin van Bruenesen, “*Mencari Ilmu dan pahala di Tanah Suci*”, dalam *Ulumul Qur'an*, Jakarta, No. 5 Voll. II. 1990, hlm. 45.

⁶ Untuk lebih jelasnya, Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*”, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 92.

Sebelum diberlakukannya aturan-aturan khusus dalam perjalanan haji, banyak orang yang singgah dari negara ke negara lain. Di samping menjalankan ibadah haji, para haji juga meniatkan untuk menetap dan memperdalam ilmu agama di Mekkah maupun Madinah kepada para guru-guru tersohor. Setelah pulang ke tanah air, ilmu-ilmu yang diperoleh dari tanah suci mereka ajarkan kepada masyarakat sekitarnya. Ilmu yang didapatkan tidak hanya sekedar dalam bidang agama saja, tetapi juga pengalaman dan wawasan ide serta gagasan-gagasan revolusioner ikut mempengaruhi karakteristik seorang haji itu sendiri.

Kenyataanya, Sejak kekuasaan kolonial Belanda, berbagai gerakan dan pemberontakan di Hindia Belanda⁷ bermunculan, sebagaimana menurut Clifford Geertz, pemberontakan besar dalam melawan penjajah yakni: Pemberontakan kaum Padri di Sumatra, pemberontakan Diponegoro di Jawa Tengah, Pemberontakan Banten di Jawa Barat dan Pemberontakan Aceh.⁸

⁷ Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, nama resmi yang digunakan adalah Nederlandsch-Indie (Hindia Belanda), sedangkan pemerintah pendudukan Jepang 1942-1945 memakai istilah To-Indo (Hindia Timur).

Masyarakat pribumi (Indonesia) yang mula-mula menggunakan istilah "Indonesia" adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913 beliau mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Pers-bureau. Nama Indonesisch (Indonesia) juga diperkenalkan sebagai pengganti Indisch (Hindia) oleh Prof Cornelis van Vollenhoven (1917). Sejalan dengan itu, inlander (pribumi) diganti dengan Indonesiër (orang Indonesia).

Pada bulan Agustus 1939 tiga orang anggota Volksraad (Dewan Rakyat; parlemen Hindia Belanda), Muhammad Husni Thamrin, Wiwoho Purbohadidjojo, dan Sutardjo Kartohadikusumo, mengajukan mosi kepada Pemerintah Hindia Belanda agar nama "Indonesia" diresmikan sebagai pengganti nama "Nederlandsch-Indie". Tetapi Belanda menolak mosi ini. Dengan pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, lenyaplah nama "Hindia Belanda". Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, lahirlah Republik Indonesia http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_nama_Indonesia.

⁸ Dalam Marwan Saridjo, *Sejarah Pondok Pesantren Di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1982), hlm. 54-55.

Pemberontakan yang dilakukan bangsa Indonesia merupakan gerakan yang ditujukan oleh kaum muslimin yang dimotori oleh para haji dan Ulama.⁹

Situasi ini erat kaitanya dengan sikap curiga dan kekhawatiran yang berlebihan Belanda terhadap umat Islam. Masalah Islam samakin lama semakin kuat dan mendominasi setiap aspek, merupakan momok yang sangat ditakutkan bagi Belanda. Hubungan dengan luar negeri, terutama para haji Indonesia dengan Arab sangat membahayakan pemerintahannya. Belanda khawatir apabila suatu saat, orang Indonesia menghimpun kekuatan dengan negara luar untuk menghancurkan Belanda. Dalam kondisi ini, Pemerintah Hindia Belanda menyimpulkan bahwa, hubungan Mekkah dengan Indonesia melalui jamaah haji, mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kondisi perpolitikan di Indonesia. Kekhawatiran Belanda akan adanya *ide-ide perang jihad* dan *Pan Islamisme*¹⁰ akan membahayakan keberadaannya.¹¹

Akibat terjadinya berbagai perlawanan oleh kaum haji dan ulama terhadap kolonial, akhirnya Pemerintahan Hindia Belanda berusaha membatasi perjalanan haji ke Mekkah. Kepercayaan masyarakat yang terlalu fanatik pada haji yang ditakutkan Belanda dapat membawa pengaruh negatif bagi eksistensinya di negeri terjajah Hindia Belanda. Terutama dalam masalah perhajian, para haji dicurigai, dianggap fanatik dan sering memberontak,

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Peranan Elit Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000), hlm. 15.

¹⁰ Pan-Islamisme (Solidaritas Seluruh Umat Islam) adalah faham politik keagamaan yang dikembangkan para pemimpin muslim pada seperempat terakhir abad ke 19, terutama sebagai reaksi langsung terhadap kehadiran barat yang semakin tak tertanggung dan juga terhadap tumbuhnya nasionalisme.

¹¹ Mursyidi Mr Sumuran Harahap, *Lintasan Sejarah Perjalanan Haji Indonesia*, (Jakarta: MARS-26, 1984), hlm. 9.

Pemerintah Belanda kemudian mengeluarkan berbagai aturan, yang bertujuan untuk membatasi dan mempersulit umat Islam ke Mekkah.¹² Oleh karena itu, untuk lebih membatasi gerak umat Islam, dikeluarkanlah *Ordonansi* yang antara lain berisi, larangan bagi umat Islam Indonesia pergi ke Mekkah jika tidak mempunyai pas jalan.¹³

Politik Islam pada awal abad XIX mengalami koreksi dan rumusan kembali oleh Christian Snouck Hurgronje,¹⁴ tidak sepatutnya mencurigai umat Islam yang menunaikan ibadah haji. Karena, mereka terdiri dari masyarakat awam yang berasal dari kelompok petani sukses. Menurutnya yang perlu diperhatikan adalah dari kalangan umat Islam yang terlibat dalam politik dan berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji. Pemerintah Belanda memahami pandangan tersebut dan akhirnya membatasi kebijakan penghentian pelaksanaan ibadah haji kepada kelompok tertentu dari kalangan umat Islam yang berpolitik. Belanda harus memberikan kebebasan dalam hal ubudiyah muamalah serta memperbolehkan para calon haji naik kapalnya, walaupun secara politik, Islam harus ditindak tegas dan bahkan harus dimusnahkan.¹⁵

Kekecewaan umat Islam terhadap urusan haji pemerintah Hindia Belanda, akhirnya timbulah suatu perbaikan perhajian di Indonesia. Ide ini

¹² Lihat Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 10.

¹³ Mursyidi Mr Sumuran, *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*, (Jakarta: MARS-26, 1923), hlm. 12-13.

¹⁴ Christian Snouck Hurgronje (1857-1930) terkenal sebagai arsitek politik Islam abad XX dan ahli Islam (*Islamwetenschap*). Pengetahuan tentang Islam diperoleh selama studinya di fakultas sastra Universitas Leiden dengan gelas Doktor pada tahun 1880. lihat Koningsveld "Snouck Hurgronje" alias Abdoel-Ghaffar" <http://www.antiqbook.nl/boox/ter/K2037-6623.shtml>.

¹⁵ Riclefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 353.

berawal dari K.H Ahmad Dahlan melalui Perserikatan Muhammadiyah tahun 1912 dengan adanya Bagian Penolong Haji yang diketuai oleh K.H.M. Sudjak. Ide ini yang kemudian mengilhami adanya Direktorat urusan haji. Pada tahun 1922 Volksraad mengadakan perubahan dalam ordonansi haji yang memunculkan Pilgrim ordonansi 1922, menyebutkan bahwa bangsa pribumi dapat mengusahakan pengangkutan calon haji.¹⁶

Sebagai realisasi dari Pilgrim Ordonansi 1922, R.A.A Djajadiningrat, R. Mulyadi Djojomartono, H. Agus Salim, dan K.H.M Sudjak berusaha mengorganisir pengangkutan jemaah haji Indonesia, namun usaha ini mendapat rintangan baik oleh maskapai pelayaran Belanda maupun pemerintah Hindia Belanda, karena takut mendapat saingan maka usaha pengangkutan jemaah haji bagi umat Islam tidak memperoleh izin.¹⁷

Munculnya perserikatan Nahdlatul Ulama (NU) tahun 1926 semakin menambah gercarnya suara barisan massa Islam untuk memperjuangkan perbaikan perjalanan haji Indonesia. Semangat dan cita-cita tersebut mendapat dukungan luas dikalangan massa Islam sehingga propaganda perbaikan perjalanan haji berjalan terus.¹⁸

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Pemerintah Belanda, berkenaan dengan politik kolonialisme terhadap Islam tepatnya mengenai masalah

¹⁶ Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perhajian II*, (T.t, 2001), hlm. 1.

¹⁷ Ada orang muslim dari Hongkong (H.Husain) yang merasa simpati dengan perjuangan umat Islam Indonesia dalam perbaikan perjalanan haji. Ia menolong dengan mengerahkan kapalnya “Kapal Islam” dengan simbol Ka’bah untuk mengangkut jemaah haji Indonesia, sehingga banyak umat Islam tertarik dan naik kapal itu karena ongkosnya bersaing. Lihat dalam Mursyidi Mr Sumuran, *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*, (Jakarta: MARS-26, 1923), hlm. 20.

¹⁸ Berbagai organisasi Islam melakukan mu’tamar ataupun kongres dengan mengusung rumusan mengenai perbaikan haji umat Islam, *Ibid*, hlm. 22-23.

perhajian, relatif terpotong-potong akibat penjajahan Jepang¹⁹ yang seumur jagung. Sejak awal kedatangan di Indonesia, Jepang mengembangkan kebijakan yang menguntungkan Islam. Mereka mendekati tokoh-tokoh Islam dan mendudukkan dalam posisi terpandang²⁰. Mereka mengizinkan organisasi Islam penting, seperti *Majlis Islam A'la Indonesia* (MIAI) untuk berdiri.

MIAI yang terlalu independen lepas dari keinginan Jepang maka pada akhir tahun 1943 organisasi tersebut dibubarkan dan kemudian diganti dengan MASYUMI (Majelis Syuro Muslim Indonesia) yang dimaksudkan untuk memperkokoh persatuan umat Islam Indonesia dan untuk meningkatkan bantuan kaum muslimin dalam usaha peperangannya Asia Timur Raya.²¹

Setelah bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan, kecurigaan akan munculnya Islam ala “Ikhwanul Muslimin”²² yang membawa gagasan-gagasan pendirian negara Islam tetap ada. Tahun 1961, Perjalanan Haji Indonesia (PHI), yayasan swasta yang ikut mengurus masalah haji dan kebanyakan anggotanya Masyumi,²³ dibekukan oleh pemerintah. Tahun 1964,

¹⁹ Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942 sampai pertengahan tahun 1945, akibat adanya pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 maka Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu

²⁰ Posisi politik penting itu akhirnya jatuh ke tangan mereka yang (dulu) dikenal sebagai “golongan nasionalis”, dengan Soekarno sebagai pemimpinnya. Lihat Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980),

²¹ Mursyidi Mr Sumuran, *Lintasan Sejarah* „, (Jakarta: MARS-26, 1923), hlm. 25.

²² Ikhwanul Muslimin merupakan suatu organisasi pergerakan Islam yang dippimpin oleh Hasan al-Banna di Mesir pada bulan Maret tahun 1928. Organisasi ini, dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran beragama bangsa Mesir ketika itu, membangun kehidupan social yang sesuai dengan ajaran Islam dan menumbuhkan daya juang untuk bebas dari Negara Inggris. Dewan Redaksi *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm.195.

²³ Masyumi merupakan wadah umat Islam sebagai satu-satunya partai politik Islam yang sejak awal menentang ide Demokrasi terpimpin Soekarno, akhirnya harus dibubarkan, karena pemerintah menerapkan program kristalisasi yang menyebabkan terjadinya pemusatan

pemerintah menyertakan Indoktrinasi politik dalam latihan-latihan untuk jamaah haji.²⁴

Dalam perjalanan Orde baru²⁵ hubungan umat Islam dengan pemerintah mengalami kondisi yang fluktuatif, umat Islam semakin terisolir. Ketegangan antara umat Islam dan pemerintah menjadikan suhu perpolitikan semakin panas. Proses pengawasan dan pengarahan terhadap umat Islam semakin ketat. Kondisi ini, mengkabatkan kekuasaan orde baru semakin tangguh, sehingga memudahkan pemerintah melebarkan fungsinya menjadi suatu wadah kekuatan politik dan perpanjangan tangan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan maupun melakukan rekayasa politik demi tercapainya strategi atau kebijakan politik yang sudah diterapkan.²⁶

Politik sebagai suatu sistem ialah suatu konsepsi yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan siapa sumber kekuasaan? Siapa pelaksana kekuasaan? Apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan serta kepada siapa kewenangan kekuasaan itu diberikan; kepada siapa pelaksanaan kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawabnya?²⁷

Penjelasan politik di atas mengindikasikan bahwa, politik tidak terlepas dari kekuasaan. Ilmuwan politik sejak lama mengkonsepsikan

kekuasaan kepada satu tangan. Lihat, Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia sebuah Potret Pasang Surut* (Jakarta: CV Rajawali Press, 1983), hlm. 154.

²⁴ Deliar Noer, *Administrasi Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 108.

²⁵ Pemerintah orde baru adalah pemerintah setelah orde lama, yang ditandai dengan adanya Surat Perintah Sebelas Maret atau SUPERSEMAR . Itulah mulai awal era baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

²⁶ Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 4.

²⁷ Munawir Sadjali, *Islam Dan Tatanegara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, cet I (Jakarta: Universitas Indonesia Press 1990), hlm. 2-3.

kekuasaan sebagai “distribusi penguasaan kekuatan dan menganggapnya sebagai inti politik”. Di dunia Islam, politik tidak hanya membahas otoritas pemaksa kepatuhan yang mapan, tetapi juga sepenuhnya berkenaan dengan tawar-menawar di antara banyak kekuatan atau kelompok yang bersaing, jika tidak bahkan lebih dengan melibatkan paksaan.²⁸

Sistem orde baru tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan masa orde lama, karena masih ada kepentingan nasional yang dijadikan alat untuk sebagian penguasa politik dan ekonomi. Sedangkan masyarakat yang menentangnya dinyatakan sebagai penghianat.

Dalam hal ini, kebijakan pemerintah terhadap konteks perhajian, dilihat umat Islam sebagai kebijakan yang sebelah mata. Para penyelenggara haji swasta tidak diikutsertakan dalam mengangkut jamaah haji. Haji dimonopoli oleh pemerintah, tetapi subsidi haji dihapuskan. Kondisi ini, menurut Syafruddin Prawiranegara sebagai penghalang umat Islam untuk memilih penawaran perjalanan haji.²⁹

Seiring dimulainya kebijakan monopoli penyelenggaraan urusan haji, umat Islam melakukan responsif sebagai bentuk protes atas ketidakadilan pemerintah. Walaupun undang-undang penyelenggaraan haji oleh pemerintah (monopoli haji) telah disyahkan, Husami (Himpunan Usahawan Muslim Indonesia) pimpinan Syafrudin memberikan respon dengan mengorganisir keberangkatan dan kepulangan 712 para jamaah haji swasta. Kejadian yang

²⁸ Dale E Eickelman, *Politik Muslim: Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), hlm. 7.

²⁹ Lihat Deliar Noer, *Administrasi Islam*, hlm. 110.

terkenal dengan Peristiwa Gambela ini mengakibatkan pihak Husami dan para jamaah haji berurusan dengan pemerintah Indonesia.

Uraian singkat ini, penulis ingin lebih dalam menelusuri perhajian khususnya pada masa setelah kemerdekaan tepatnya tahun 1960-1970. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam perhajian memberikan cukup pengaruh terhadap umat Islam, tidak hanya aspek politik, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya. Aspek agamapun, kalau mengganggu stabilitas nasional, pemerintah tidak segan-segan untuk melumpuhkan kekuatan umat Islam.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) politik adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan dan siasat dsb) mengenai pemerintah atau negara terhadap negara lain.³⁰ Berbeda dengan Miriam Budiardjo yang memaknai politik sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.³¹

Sedangkan perhajian (kata benda) merupakan dari akar kata “Haji”, yang mendapat imbuhan “per” dan “an” artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan haji; seluk-beluk haji.³²

³⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 397.

³¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999), hlm. 8.

³²<http://bahatera.org/kateglo/?mod=dictionary&action=view&phrase=perhajian>, diakses pada tanggal 18 Juli 2009.

Permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah berkisar pada tahun 1960-1970. Pada tahun tersebut kebijakan-kebijakan oleh pemerintah Indonesia terhadap umat Islam khususnya masalah perhajian di Indonesia sangat hegemonis dan politis yang kemudian menimbulkan peristiwa dalam sejarah perhajian sebagai bentuk reaksi terhadap kebijakan perhajian di Indonesia. Sedangkan Politik yang di maksud dalam tulisan ini adalah mencoba menelusuri kebijakan terhadap umat Islam dengan melakukan sentralisasi oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi perjalanan haji di Indonesia.
2. Bagaimana Politik perhajian di Indonesia
3. Mengapa Pemerintah menetapkan Politik perhajian

C. Tujuan dan Kegunaan

Sebuah penelitian diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya, kalangan intelektual Islam khususnya para pengkaji dan peminat tentang perhajian di Indonesia. Oleh karena itu penelitian tentang politik perhajian ini diharapkan dapat mencapai tujuan untuk:

1. Mengetahui Kondisi perhajian di Indonesia pasca Kemerdekaan
2. Untuk mengetahui bagaimana politik pemerintah terhadap perhajian di Indonesia

3. Untuk mengetahui alasan mengapa Pemerintah menetapkan politik perhajiannya

Melihat tujuan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk:

1. Memberikan informasi dan wacana baru tentang sejarah Islam, khususnya perhajian di Indonesia
2. Memberikan pengertian tentang perhajian di Indonesia pada khalayak umum dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya.
3. Menambah khazanah dan ilmu pengetahuan Sejarah Nasional Indonesia dan kepustakaan bidang Sejarah Kebudayaan Islam serta memperkaya khazanah historiografi Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu usaha untuk memperoleh data yang sudah ada, karena data merupakan satu hal terpenting dalam ilmu pengetahuan, yaitu untuk menyimpan generalisasi fakta-fakta, meramalkan gejala-gejala baru, mengisi yang sudah ada atau yang sudah terjadi.³³ Tulisan mengenai haji khususnya dalam kajian politik di Indonesia banyak peneliti temukan, menurut sumber yang penulis ketahui, kebanyakan tulisan haji pada masa kolonial. Ada beberapa buku tulisan warga Indonesia, namun tahun serta pendekatannya berbeda.

³³ Taufik Abdullah dan Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 4.

Tulisan Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, memaparkan praktik pelaksanaan haji masyarakat muslim di Indonesia sejak abad XV hingga pertengahan pertama abad XX. Shaleh juga mengeksplorasi tentang haji baik dalam aspek politik, sosial maupun budaya. Kemudian tulisan Christian Snouck Hurgronje, “*Politik Haji Pemerintah Hindia Belanda 1909*”, dalam *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*, terjemahan Soedarso Soekarno dan Sutan Maimun. Hurgronje menawarkan pemikirannya dalam masalah politik terhadap umat Islam. Pelarangan terhadap calon jemaah haji sebelum kedatanganya Hurgronje ke tanah suci pada akhirnya diberikan jalan untuk melaksanakan haji, Hurgronje tidak memperbolehkan calon jemaah haji jika setelah kepulangannya melakukan hal-hal diluar batas keIslam atau masuk pada wilayah politik praktis. *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*, terbitan INIS, tahun 1924, dalam tulisan tersebut, pemerintah Belanda melakukan polarisasi politik Islam khususnya terhadap perhajian, hingga menerapkan aturan-aturan politik yang dapat merugikan para jemaah haji. Adapun tulisan terdahulu yang pernah di tulis oleh H. Aqib Suminto. *Politik Islam Hindia Belanda*. Dalam buku ini menguraikan kebijakan-kebijakan Belanda terhadap umat Islam secara keseluruhan. Meskipun dalam buku ini berbicara mengenai kebijakan perhajian Belanda, akan tetapi belum mengungkit secara detil ordonansi perhajian. Dalam buku ini titik penekanannya berada di sekitar peran *Kantor Voor Inlandsche Zaken* sebagai simbol kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda.

Buku *Gerakan Modern Islam di Indonesia* oleh Deliar Noer, pembahasasanya lebih mengarah kepada pembaharuan-pembaharuan pemikiran. Munculnya organisasi-organisasi Islam di Indonesia sebagai reaksi perjuangan melawan penjajah bangsa Belanda. Di samping itu buku ini juga sangat mendalami kedudukan Islam pada masa penjajahan Belanda dan lahirnya gerakan-gerakan Islam Modern.

Tulisan lainnya yakni, Mursyidi Mr dan Sumuran Harahap menulis tentang *Lintasan Sejarah Perjalanan Haji Indonesia*, terbitan tahun 1984. mengungkap secara lebih jelas mengenai penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun, dengan klasifikasi perhajian di Indonesia mulai dari zaman Kolonial hingga orde baru. Sjafruddin Prawiranegara dalam karangan *Djangan Mempersulit Ibadah Hadji*, di terbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Usahawan Muslim Indonesia tahun 1970. Buku ini merupakan karangan Sjafrudin Prawiranegara ketika khotbah Idul Adha.

Karya-karya tersebut berbeda dengan penelitian ini dalam hal fokus pembahasan. Penelitian ini berusaha untuk mencari sisi lain dari perhajian di Indonesia dalam perspektif politik.

E. Landasan Teori

Penulisan Sejarah merupakan bentuk dari proses pengkisahan atas peristiwa-peristiwa manusia yang terjadi masa lalu.³⁴ Melalui penelitian

³⁴ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 5.

sejarah diharapkan dapat menghasilkan penjelasan tentang berbagai hal mengenai sejarah nasional Indonesia.

Dalam kajian politik unsur paling dominan yang dapat dipisahkan adalah unsur Negara dan kekuasaan. Kekuasaan secara inheren pada dasarnya sudah melekat pada diri manusia sebagai manusia politik. Jadi secara mendasar manusia memiliki keinginan yang mutlak tentang kekuasaan.

Penelitian ini menggunakan teori kekuasaan. Menurut Robert M. MacIver kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan perilaku orang lain secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung dilakukan dalam bentuk memaksa, sedangkan secara tidak langsung berupa penyusunan segala infrastruktur kekuasaan yang dapat dilakukan melalui proses rekayasa.³⁵

Kekuasaan ini dilakukan melalui adanya pola hubungan dimana terdapat pihak yang menunjang posisi sentral pemerintahan dan pihak lain terdapat ketundukan atau ketiaatan yang diberikan sebagai interaksi yang terjadi dari kedua belah pihak. Dalam proses tersebut akan menimbulkan pihak yang tersingkirkan karena adanya pihak yang diatas lebih berperan dan membawahi pihak yang lebih rendah posisinya.³⁶

Dalam penelitian ini juga menggunakan konsep ideologi. Ideologi disini sebagai gambaran tentang masyarakat di dalam suatu Negara. Meskipun ideologinya adalah salah satu faktor yang ikut menentukan proses dan arah kehidupan politik. Konsep ideologi ini mencerminkan suatu konflik yang

³⁵ Deden Fathurrahman dan Wawan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik* (Malang: UMM Press, 2002), hlm. 22-23.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

timbul dari kepentingan kelompok yang berkuasa sehingga memunculkan sikap saling menghancurkan. Dari konsep idiosiologi inilah muncul sikap perlawanan dari kelompok-kelompok yang tertindas untuk mengubah dan menerima kondisi yang ada.³⁷

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik dan pendekatan sosiologis. Pendekatan politik digunakan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah bagi umat Islam. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui peranan umat Islam pada saat peristiwa sejarah itu berlangsung.

F. Metode Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah, yaitu dalam pengkajian dan menganalisis permasalahannya mengutamakan perspektif masa lampau dari obyek yang diteliti.³⁸ Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk selalu mengutamakan aspek rasionalitas agar diperoleh hasil yang dapat dipercaya, terhadap data yang telah ditemukan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh berdasarkan metode sejarah sebagai berikut:³⁹

³⁷ Karl Mannheim, *Idiologi dan Utopia Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 42.

³⁸ Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, trj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 19.

³⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), hlm. 12.

1. Pengumpulan Data (Heuristik)

Terkait dengan judul penelitian Politik Perhajian di Indonesia, maka teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah *library research*. Penulis membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat disuatu perpustakaan.⁴⁰ kepustakaan tidak hanya dalam bentuk buku saja, akan tetapi mencakup karya-karya ilmiah seperti: skripsi, laporan penelitian, artikel, majalah dan internet.

2. Pengujian Sumber (Verifikasi)

Setelah data terkumpul peneliti akan melakukan seleksi untuk mendapatkan keabsahan sumber. Penulis melakukan kritik ekstern terhadap bahan yang dikumpulkan untuk mencari keontetikan sumber. Kemudian dilanjutkan dengan kritik intern untuk mengetahui isi dari sumber bahan dalam mencari kredibilitasnya. Melalui kritik ini, diharapkan penulisan ini dapat menggunakan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penafsiran Sejarah (Interpretasi)

Upaya yang dilakukan penulis pada tahap ini adalah menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan data yang terkumpul, dengan tujuan agar menguasai bahasan atau masalah yang dibahas. Setelah itu mengadakan sistesis sebagai penyatuan data yang diperoleh sesuai dengan kerangka penulisan. Dalam proses penafsiran ini, seorang peneliti harus berusaha mencapai pengertian faktor-faktor

⁴⁰ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

yang menyebabkan terjadinya peristiwa.⁴¹ tahap ini dimaksudkan untuk mencari runtutan peristiwa sejarah sehingga menjadikan rangkaian cerita sejarah yang tak terputus.

4. Penulisan Sejarah (Historiografi)

Setelah melakukan analisis peristiwa dan ditemukan data yang benar-benar otentik sesuai tema penulisan kemudian penulis memaparkan rangkaian data yang masih bersifat fragmentaris tersebut ke dalam sebuah tulisan. Penulis berusaha menuangkan hasil penelitiannya dalam sebuah tulisan, untuk memberikan keterangan dan penjelasan kepada pembaca tentang sejarah perhajian dan bagaimana dengan perpolitikan didalam perhajian itu sendiri.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari pembahasan penelitian ini, maka peneliti membagi tulisan ini ke dalam lima bab.

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi, latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan awal perencanaan penelitian untuk memberikan gambaran secara umum yang lebih jelas terhadap masalah yang akan diteliti.

Bab Kedua, diuraikan mengenai kondisi perjalanan haji di Indonesia secara umum. Selanjutnya dibahas tentang makna haji, perjalanan haji masa

⁴¹ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 64.

pemerintahan Belanda begitu juga Perjalanan haji setelah kemerdekaan yang meliputi masa Pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan haji setelah kemerdekaan dan kondisinya di perjalanan.

Bab Ketiga, dipaparkan mengenai bagaimana politik perhajian pemerintah Indonesia khusunya kepada umat Islam. Pembahasannya meliputi latar belakang yang menimbulkan kebijakan-kebijakan terhadap perhajian. Selanjutnya bagaimana politik haji itu sehingga menimbulkan monopoli pemerintah Indonesia. Pada bab ini merupakan analisis penulis untuk menjelaskan politik perhajian sehingga menimbulkan reaksi dan protes-protes dikalangan umat Islam.

Bab keempat, menjelaskan Mengapa Pemerintah menetapkan politik perhajian di Indonesia. Pengaruh transnasional di Indonesia terhadap gerakan-gerakan umat Islam. Tidak hanya itu saja, pada bagian ini juga akan dijelaskan mengenai konflik politik umat Islam dengan pemerintah, yang nantinya akan menimbulkan kebijakan-kebijakan terhadap umat Islam dan ajaran-ajarannya.

Selanjutnya Bab Kelima adalah penutup, yang meliputi kesimpulan terhadap keseluruhan skripsi, yang diharapkan dapat menarik sebuah kesimpulan pada bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas rumusan masalah yang ada. disamping itu, bab ini juga akan dipaparkan mengenai saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ibadah haji dilakukan sudah sejak masa penjajahan. Bagaimanapun kondisinya, unsur politis sangat kental sekali. Jika masa pemerintahan Belanda muncul *Islamophobia* dan *hajiphobia*, maka setelah kemerdekaan Islam mendapatkan label Islam ala Ikhwanul Muslimin pada masa rezim Soekarno dan ekstrim kanan masa pemerintahan Soeharto. Memang, pada sisi yang lain, dalam keadaan tertentu ibadah haji bisa menjadi revolusioner dan fanatis dalam menghadapi setiap bentuk ketidakadilan.

Hubungan pemerintah dengan umat Islam mengalami benturan yang mengakibatkan saling bermusuhan, dari persoalan ketatanegaraan kemudian menjalar pada persoalan konstitusi. Satu sisi pemerintah melakukan pengarahan, sisi yang lain pemerintah mengadakan pengawasan, sehingga meningkatnya jemaah haji ke Mekkah menjadi kekhawatiran pemerintah terhadap kekuatan umat Islam, para haji akan bertemu dengan sekian warga muslimin di segala bidang mengakibatkan umat Islam dalam posisi terpinggirkan. Pemerintah yang ditunggangi oleh militer menyebabkan umat Islam dalam posisi pingiran. Secara politis, ibadah haji merupakan media strategis untuk membawa pengaruh-pengaruh dari luar. Munculnya Masyumi dan Wahabi merupakan bentuk akumulasi pemikiran yang tumbuh oleh keadaan-keadaan tertentu. Pemikiran itu secara tidak langsung akan mempengaruhi dinamika-dinamika umat Islam di Indonesia.

Kekhawatiran pemerintah terhadap kekuatan umat Islam pada akhirnya, pemerintah harus melakukan kebijakan-kebijakan terhadap perhajian. Pemerintah melakukan monopoli perhajian dan melarang bagi Swasta yang ikut menyelenggrakan haji, karena haji merupakan tugas nasional bagi pemerintah. Oleh karena itu pemerintah melakukan sentralisasi perhajian.

B. Saran-saran

Sebelum penulis akhiri tulisan ini, senantiasa penulis berharap kepada penulis yang akan datang khususnya mengenai masalah perhajian agar lebih detail dalam mengolah teks-teks. Masa orba adalah suatu masa gelap dalam memahami sebuah permasalah. Tulisan-tulisan yang sekiranya agak menyudutkan pemerintah menjadi ancaman tersendiri, bahkan mungkin menjadi masalah serius, sebagai mana kasus majalah Detik, Tempo dan malajah-majalah lainnya yang menjadi musuh pemerintah.

Mengenai masalah-masalah tulisan ini, penulis ingin mengetengahkan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi penulis lainnya:

Pertama, Penulisan skripsi ini membutuhkan penyempurnaan dalam hal perluasan kajiannya. Sebagaimana penulisan terdahulu, banyak sumber-sumber dengan bahasa asing, walaupun ada tulisan-tulisan dari orang Indonesia, namun itupun masih minim. Perlunya kajian yang serius mengingat masalah haji adalah masalah umat islam.

Kedua, Karya tulis tentang sejarah perjalan haji di Indonesia lebih banyak dikaji oleh orang-orang barat, terutama Belanda. Besar harapan penulis agar

dalam masa mendatang muncul seorang penulis Indonesia untuk menulisnya sehingga bermanfaat perkembangan ilmu sejarah.

Ketiga, hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan dimasa mendatang ada penelitian yang berusaha menggali nilai-nilai yang belum terungkap dalam karya ini.

Sebagai penutup, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia dalam, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang: CV. Toha putra, 1989.

Buku

Abdul Madjid, Ahmad, *Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umroh*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993.

Abdullah, Taufik dan Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos, 1999.

_____, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

K. Ali, *Sejarah Islam (Tarikh Pramodern)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Anwar, Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 2005.

Benda, J. Harry, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Jld. 1 Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Departemen Pendidikan Nasional, *Peranana Elit Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000.

Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perhajian II*, T.t, 2001.

Dipohusodo, Istimawan, *Ibadah Haji Seperti Sunnah Rasul*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Douwes dan Niko Kaptein, *Indonesia dan Haji*, terj. Soedarso Soekarno, Jakarta: INIS, 1997.

Effendy, Bachtiar, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*, Yogyakarta : GalangPrees, 2001.

Fathurrahman, Deden dan Wawan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: UMM Press, 2002.

Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, trj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 1985.

Ghani, Abdul, Muhammad Ilyas *Sejarah Kota Mekah Klasik dan Modern*, Jakarta: AKBAR, 2003.

Hurgronje, Snouck, *Islam di Hindia Belanda*, terj. S. Gunawan, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983.

Karim, Rusli, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta: CV Rajawali Press, 1983.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2001.

_____, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Yogyakarta: Shalahudin Press dan Pustaka Pelajar, 1994.

Laporan Penyelenggaraan Urusan Hadji, Djakarta: Direktorat Djendral Urusan Hadji, 1970.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Mannheim, Karl, *Idiologi dan Utopia Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Marwan, Saridjo, *Sejarah Pondok Pesantren Di Indonesia*, Jakarta: Dharma Bhakti, 1982.

Mursyidi, Mr. dan Sumuran Harahap, *Lintasan Sejarah Perjalanan Haji Indonesia*, Jakarta: PT. Melton Putra, 1984.

Noer, Deliar, *Administrasi Islam*, Jakarta: Rajawali, 1983.

Riclefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Risalah Musjawarah Kerdja Urusan Hadji Seluruh Indonesia ke-VI, Djakarta: Direktorat Djendral Urusan Hadji, 1972

Subagyo, Ahmad, *Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000.

Steenbrink, A. Karel, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Sudarsono dan Susmayati, *Mengenal Keesaan Tuhan Ka'bah Pemersatu Umat Islam*, t.t: Asdi Mahastya, 1992.

Suminto, Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1996.

Thaba, Abdul Aziz *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Uwaiddah, *Fiqih Wanita*, terj. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Wahid, Abdurrahman, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute, 2009.

Yusuf, Nasir, *Problematika Manasih Haji*, Bandung: Pustaka, 1985.

Jurnal

Anwar, Dewi Fortuna, *Kaabah dan Garuda: Dilema Islam di Indonesia*, Prisma, No. XII. April 1984.

Bruenesen, Martin van, “*Mencari Ilmu dan pahala di tanah Suci*”, dalam Ulumul Qur'an, Jakarta, No. 5 Voll. II. 1990.

Rais, Amin, *Gerakan-gerakan Islam Internasional dan Pengaruhnya bagi Gerakan Islam Indonesia*, dalam Prisma, No. Ekstra, XII. 1984.

Tamara, Nasir, *Sejarah politik Islam Orde baru*, Prisma, No. XVII. 1988.

Zamakhsyari Dhofier, *Dampak Ekonomi Haji*, Prisma, Jakarta: No. 13, Th. Ke-XL: Oktober, 1984

Ensiklopedi

Dewan Redaksi *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Ikhwan. dkk., *Ensiklopedi Haji dan Umrah*, Abdul Halim (ed.), Cet. 1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Kamus

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Koran

Salim, Hairus, *Citra politik dan Sosial Haji*, BERNAS, 5 April 1995

Koran "KOMPAS" Sabtu, 27 Desember 2003.

Koran "Abadi" tanggal 3 Januari 1973

Web Site (Internet)

<http://bahatera.org/kateglo/?mod=dictionary&action=view&phrase=perhajian>,
diakses pada tanggal 18 Juli 2009.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_nama_Indonesia. diakses pada tanggal 16 Nofember 2009

<http://www.antiqbook.nl/boox/ter/K2037-6623.shtml>. diakses pada tanggal 16 Nofember 2009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Syaiful Haq
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 28 Nofember 1983
Nama Ayah : M. Zuhri Anwar
Nama Ibu : Ma'rifah
Asal Sekolah : SMU Walisongo Pecangaan Jepara
Alamat Kos : Jl. Wahid Hasyim 102 Condong Catur Sleman
Alamat Rumah : Banjaran Candi Bangsri Jepara
E-mail : haqsyaiul@yahoo.com
Hp : 087832690057

B. Riwayat Pendidikan

- a) Taman Kanak-Kanak GUPPI Banjaran
- b) SDN Wedelan Bangsri Jepara
- c) MTs Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara
- d) SMU Walisongo Pecangaan Jepara
- e) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

- 1. Pengurus Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Fakultas Adab UIN Sunan kalijaga
- 2. Pimpinan Redaksi Lembaga Pers Mahasiswa “Literasia” Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga
- 3. Ketua Umum Mahasiswa Sunan Kalijaga Yogyakarta Jepara (MASKARA)
- 4. Pengurus Komunitas Mahasiswa Sejarah (KMS)
- 5. Ketua Keluarga Jepara Yogyakarta (KJY)
- 6. Wakil Ketua BEM-J Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab